

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor DPRD Kabupaten Siak merupakan kantor perwakilan rakyat di tingkat kabupaten yang berfungsi sebagai representasi rakyat dalam perpolitikan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam kantor DPRD Kabupaten Siak yaitu: 1) merancang dan membentuk peraturan daerah; 2) membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 3) dan berfungsi untuk mendukung sekaligus mengawasi kegiatan pemerintah. Kantor DPRD Kabupaten Siak diisi dan digunakan oleh anggota DPRD, pegawai honorer, *outsourcing*, dan masyarakat umum.

Dengan banyak dan padatnya aktivitas para anggota parlemen, tak jarang ditemukan banyak kasus yang membuat citra para anggota dewan menjadi buruk, dan memiliki cap sebagai pemalas. Diantaranya disebabkan oleh banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna, dan beberapa lainnya bahkan tertidur di dalam ruang rapat (Perludem 2019). Tentu hal-hal tersebut sangat berdampak pada kinerja pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para anggota parlemen, yang akhirnya menyebabkan keputusan rapat tidak efektif, maupun tidak relevan terhadap kondisi masyarakat daerah yang dipimpin.

Perilaku seperti teridur didalam ruang rapat paripurna, banyak didasari oleh faktor kelelahan kerja, namun jika dikaji dalam ilmu interior desain, kondisi tersebut tersebut bisa muncul dari faktor suasana ruangan yang menjenuhkan. Oleh karena itu dalam perancangan kerja anggotadewan diperlukan adanya pendekatan perilaku aktivitas penggunaannya, untuk mengetahui bagaimana kondisi penggunaannya, bagaimana kebutuhan penggunaannya, dan berapa lama durasi kerjanya secara umum. Agar perancangan ruangan dapat menunjang aktivitas yang dilakukan didalamnya serta, dapat meningkatkan kinerja pengguna ruangnya juga.

Pendekatan arsitektur melalui perilaku menekankan keterkaitan dialektik (hubungan dua arah), antara ruang dengan manusia yang memanfaatkan ruang tersebut. Keterkaitan tersebut kemudian melahirkan hubungan sebab akibat, apakah desain ruangan mampu menjadi sebuah hal solutif bagi permasalahan pada ruangan dan penggunaannya saat berada diruangan. Pola perilaku yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas pekerjaan membutuhkan desain yang baik dari segi aksesibilitas dan memungkinkan alur pergerakan tanpa hambatan. Sehingga, penempatan kursi dan fasilitas penting seperti podium dan layar proyektor harus dirancang agar semua anggota dapat dengan mudah berinteraksi tanpa hambatan fisik. Sementara itu, keseimbangan antara privasi dan keterbukaan juga menjadi pertimbangan penting dalam desain. Ruangan harus menawarkan privasi yang cukup untuk diskusi yang sensitif, tetapi juga menciptakan suasana yang terbuka untuk mendukung dialog terbuka di antara anggota DPRD.

Secara keseluruhan, desain interior ruang rapat DPRD dengan pendekatan prinsip perilaku memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan partisipatif. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti fungsionalitas, ergonomi, aksesibilitas, privasi, penggunaan teknologi, dan fleksibilitas ruang, ruang rapat DPRD dapat menjadi alat yang kuat dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, keterlibatan yang inklusif, dan pengambilan keputusan yang berdampak bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip perilaku dalam desain ruang rapat DPRD akan memperkuat peran ruang tersebut sebagai pusat aktivitas yang penting dalam pemerintahan daerah.

Fungsi ruangan parlemen tidak hanya terbatas pada aspek praktis dalam proses legislatif, tetapi juga melibatkan dimensi filosofis yang mendalam dalam konteks arsitektur. Dalam memahami makna dan tujuan di balik desain ruang dan bangunan, serta bagaimana hal itu memengaruhi pengalaman manusia di dalamnya, filosofi arsitektur menyoroti berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan. Desain ruangan yang simetris

dan kesetaraan dalam tata letaknya mencerminkan aspirasi untuk menciptakan ruang yang inklusif dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring dengan itu, ruang parlemen juga harus menampilkan wibawa dan martabat yang sesuai dengan perannya sebagai pusat kegiatan legislatif. Selain representasi, ruang parlemen juga harus mencerminkan prinsip keterbukaan dan transparansi sebagai fondasi dari pemerintahan yang demokratis. Seiring dengan itu, ruang parlemen juga harus menampilkan wibawa dan martabat yang sesuai dengan perannya sebagai pusat kegiatan legislatif.

Namun berdasarkan hasil observasi pada kantor DPRD Kab. Siak belum sepenuhnya memenuhi standart untuk ruangan rapat ideal, yang dapat menanggulangi masalah kejenuhan, dan meningkatkan kinerja pengguna ruangnya. Beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya; pola sirkulasi ruangan yang memberikan kesan kaku, pemilihan *furniture* pada ruangan kurang efektif untuk mobilitas penggunaannya, pemilihan konsep bentuk furniturnya yang kurang sesuai dengan standart ergonomi furniture untuk aktifitas kantor, kemudian besaran jalur sirkulasi aktivitas pada beberapa ruangan masih kurang ideal. Maka diperlukan adanya redesain untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kantor DPRD Kab. Siak, guna memperbaiki kualitas kerja dan kestabilan pemerintahan Kab. Siak.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek filosofis ini, sebuah perancangan (*design*) dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang memenuhi fungsi praktisnya sebagai pusat kegiatan legislatif, secara simultan juga mengkomunikasikan nilai-nilai penting dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang sehat (*good governance*). Dalam prosesnya, desain interior ruang parlemen menjadi lebih dari sekadar tempat rapat, tetapi juga menjadi representasi fisik dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang inklusif dan berdaya.

Perancangan ulang kantor DPRD Kabupaten Siak dengan pendekatan perilaku menjadi subjek yang relevan. Hal ini dikarenakan menanggapi kebutuhan akan lingkungan kerja yang memfasilitasi produktivitas dan kesejahteraan staf serta anggota DPRD. Dalam konteks ini, tugas akhir perancangan interior ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pendekatan perancangan berbasis perilaku dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas lingkungan kerja di kantor DPRD Kabupaten Siak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan melakukan observasi serta wawancara, disusun beberapa identifikasi masalah untuk memberikan arah bagi penelitian ini, yaitu.

1. Permasalahan pengorganisasian ruang meliputi layout ruang rapat paripurna yang terkonsep kurang dinamis, sehingga berpotensi menyebabkan kejenuhan pengguna pada ruangan.
2. Besaran sirkulasi area aktivitas pengguna ruang kurang ideal, sehingga pada beberapa bagian ruangan pengguna sulit untuk berjalan dengan posisi badan lurus, kebanyakan berjalan dengan miring, seperti pada ruang parlemen.
3. Pemilihan furniture ruangan dengan konsep bentuk yang kaku dan juga berat dikarenakan menggunakan material kayu solid, menyebabkan pengguna ruangan mengalami masalah mobilitas.
4. Desain meja kursi anggota dewan pada ruang rapat paripurna, belum memenuhi standart ergonomi meja dan kursi kerja, sehingga untuk aktifitas pekerjaan lama, berpotensi menyebabkan kelelahan.
5. Suasana ruangan pada kantor DPRD Siak, menerapkan konsep ruang yang minimalis, namun pada beberapa aspek ruangan terdesain terlalu sederhana, sehingga ruangan tidak dapat

terkoneksi dua arah dengan penggunaannya untuk menstimulus peningkatan kinerja anggota dewan saat berada dalam ruangan.

1.3 Rumusan Masalah

Beberapa identifikasi masalah di atas, kemudian dideduksikan untuk mendapatkan rumusan masalah. Proses ini kemudian diturunkan lagi ke dalam bentuk pertanyaan penelitian. Di antaranya adalah:

1. Bagaimana perilaku anggota DPRD Kabupaten Siak dalam memanfaatkan ruang rapat saat ini, dan bagaimana perilaku tersebut memengaruhi efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan?
2. Apa saja kebutuhan dan preferensi anggota DPRD Kabupaten Siak terkait dengan desain ruang rapat yang dapat meningkatkan kinerja mereka serta mendukung interaksi dan kolaborasi yang lebih baik?
3. Bagaimana suasana ruang dapat mengurangi tingkat kejenuhan anggota DPRD pada ruang rapat, dan juga turut meningkatkan kinerja dalam proses penyusunan keputusan dalam ruang rapat paripurna?
4. Bagaimana mengoptimalkan kondisi ruang melalui peningkatan fasilitas ruangnya, meliputi perbaikan pada fasilitas meja dan kursi kerja, yang belum memenuhi standart ergonomi untuk aktivitas kerja?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari perancangan ulang DPRD Kabupaten Siak sebagai upaya untuk memberikan langkah solutif dari berbagai permasalahan yang telah ditemukan di atas dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini. Di antaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalaman ruang pada kantor DPRD Kabupaten Siak.
2. Memenuhi kebutuhan dan preferensi anggota DPRD Kabupaten Siak terkait dengan peningkatan dan perbaikan fasilitas ruangan.
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip desain interior yang ergonomis, dalam desain ruang untuk anggota DPRD Kabupaten Siak, sehingga memastikan kenyamanan dan partisipasi yang optimal selama rapat berlangsung.

1.4.2 Sasaran Perancangan

Sasaran dari perancangan ulang untuk kantor DPRD Kabupaten Siak dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini. Di antaranya adalah:

- 1 Merancang tata letak ruang rapat DPRD Kabupaten Siak yang memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi, sehingga memungkinkan anggota DPRD untuk duduk dengan nyaman selama rapat berlangsung dan mengurangi kelelahan.
- 2 Mengintegrasikan berbagai prinsip, seperti ergonomi dan estetika untuk mencapai tahap pengalaman ruang yang ideal, sehingga memberikan arah kepada penghuni agar bersatu (*in union with*) dengan keadaan ruangan tersebut, termasuk pembahasan-pembahasan untuk pengambilan keputusan.
- 3 Memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam desain ruang rapat paripurna, sehingga anggota DPRD dapat merasa

aman dan terlindungi ketika berdiskusi mengenai masalah-masalah sensitif.

- 4 Mengoptimalkan penggunaan ruang dengan merancang ruang rapat yang fleksibel, dapat diatur ulang untuk berbagai jenis rapat dan kegiatan lainnya, sehingga memaksimalkan mobilitas pada ruangan.
- 5 Menyediakan fasilitas dan ruang terpisah untuk pertemuan informal antara anggota DPRD, staf, dan konstituen, sehingga mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik di luar rapat resmi.
- 6 Menciptakan suasana ruang yang dapat memberikan rasa nyaman dan juga menstimulus anggota DPRD untuk lebih meningkatkan kinerjanya selama rapat paripurna, maupun bekerja pada ruangan.

1.5 Batasan Perancangan

Batasan Perancangan pada Gedung Kantor DPRD ini pada:

- a. Objek Perancangan ini berlokasi di Jl. Panglima Ghimbam No. 2, Kabupaten Siak berdekatan dengan kantor pemerintahan agama Kabupaten Siak, dan kantor dinas pemerintahan Kabupaten Siak lainnya.
- b. Perancangan ini menggunakan Gedung parlemen yang baru dengan luas $\pm 2.210 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 2 lantai.
- c. Ruang-ruang yang akan dirancang yaitu;

Tabel 1. 1 Tabel Batasan Perancangan

No.	Nama Ruang	Jumlah Ruang	Luas Ruang	Total Luas Ruang
1	Lobby	1	-	440.83 m ²
2	Ruang Tunggu Lantai 1	2	220.32 m ²	440.64 m ²
3	Ruang Tunggu Lantai 2	2	333 m ²	666 m ²
4	Ruang Rapat Paripurna	1	-	473.90 m ²
5	Ruang Pers	1	-	189 m ²
Total Luas Perancangan (m ²)				2.210 m ²
Total Luas Bangunan (m ²)				

1.6 Manfaat Perancangan

Penulis menginisiasi beberapa manfaat dari perancangan ulang dengan objek kantor DPRD Kabupaten Siak. Beberapa manfaat tersebut diproyeksikan berdasarkan tiga kategori. *Pertama*, manfaat yang diarahkan untuk penghuni aktifnya, yaitu anggota DPRD. *Kedua*, dikarenakan perancangan ini masuk ke dalam kategori publik, maka diarahkan pula sisi manfaatnya untuk masyarakat yang dalam hal ini termasuk para awak media, jurnalis, dll. Selain itu, manfaat yang ingin dicapai juga diarahkan untuk kebutuhan akademik, khususnya keilmuan interior.

Berikut beberapa manfaat perancangan yang diuraikan poin per poin:

1.6.1 Manfaat bagi Anggota DPRD

- 1.6.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam ruang rapat, sehingga memungkinkan anggota DPRD untuk fokus pada proses pengambilan keputusan tanpa distraksi yang tidak perlu.
- 1.6.1.2. Menyediakan ruang yang inklusif dan demokratis, memastikan bahwa semua anggota DPRD merasa dihargai dan memiliki akses yang sama dalam berpartisipasi dalam proses legislasi.
- 1.6.1.3. Memperkenalkan teknologi yang lebih baik dan fasilitas yang

dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan anggota DPRD dalam rapat.

1.6.2 Manfaat bagi Masyarakat (termasuk pers dan jurnalis)

- 1.6.2.1. Membangun transparansi dan aksesibilitas dalam proses keputusan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami dan terlibat secara lebih aktif dalam politik lokal.
- 1.6.2.2. Menyediakan ruang terbuka untuk pertemuan dengan konstituen, memperkuat hubungan antara anggota DPRD dan masyarakat yang mereka wakili.
- 1.6.2.3. Memfasilitasi pertemuan dengan media massa dan jurnalis, memungkinkan informasi yang lebih akurat dan transparan untuk disampaikan kepada publik.

1.6.3 Manfaat Bagi Keilmuan Interior

- 1.6.3.1 Menyediakan studi kasus yang kaya tentang implementasi prinsip prinsip perilaku dalam desain ruang pemerintahan lokal, memberikan wawasan baru bagi praktisi desain interior.
- 1.6.3.2 Memperkaya pengetahuan tentang integrasi teknologi dalam desain ruang rapat, menyoroti tantangan dan peluang dalam menghadirkan diskursus yang mendalam.
- 1.6.3.3 Menghasilkan panduan desain yang dapat diterapkan pada proyek-proyek sejenis di masa depan, membantu membangun lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan penggunanya.

1.7.1 Tahapan Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam perancangan ini difokuskan pada memperoleh informasi terkait dengan kantor DPRD Kabupaten Siak, objek perancangan yang sedang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, termasuk wawancara, observasi langsung di lapangan, dokumentasi objek perancangan, serta studi literatur yang mencakup jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan konteks perancangan tersebut.

1.7.2 Observasi

Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung gedung kantor DPRD Kabupaten Siak sebagai objek perancangan yang sedang diteliti. Observasi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di ruang rapat tersebut atau analisis perilaku. Pendekatan ini didukung oleh referensi literatur serta regulasi daerah yang mengatur mengenai batasan perancangan gedung pemerintah, khususnya nuansa parlementer.

1.7.3 Studi Lapangan

Penelitian lapangan ini melibatkan wawancara dengan pihak yang memiliki kewenangan terkait beberapa objek perancangan yang berbeda, guna memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup metode observasi langsung oleh peneliti terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut.

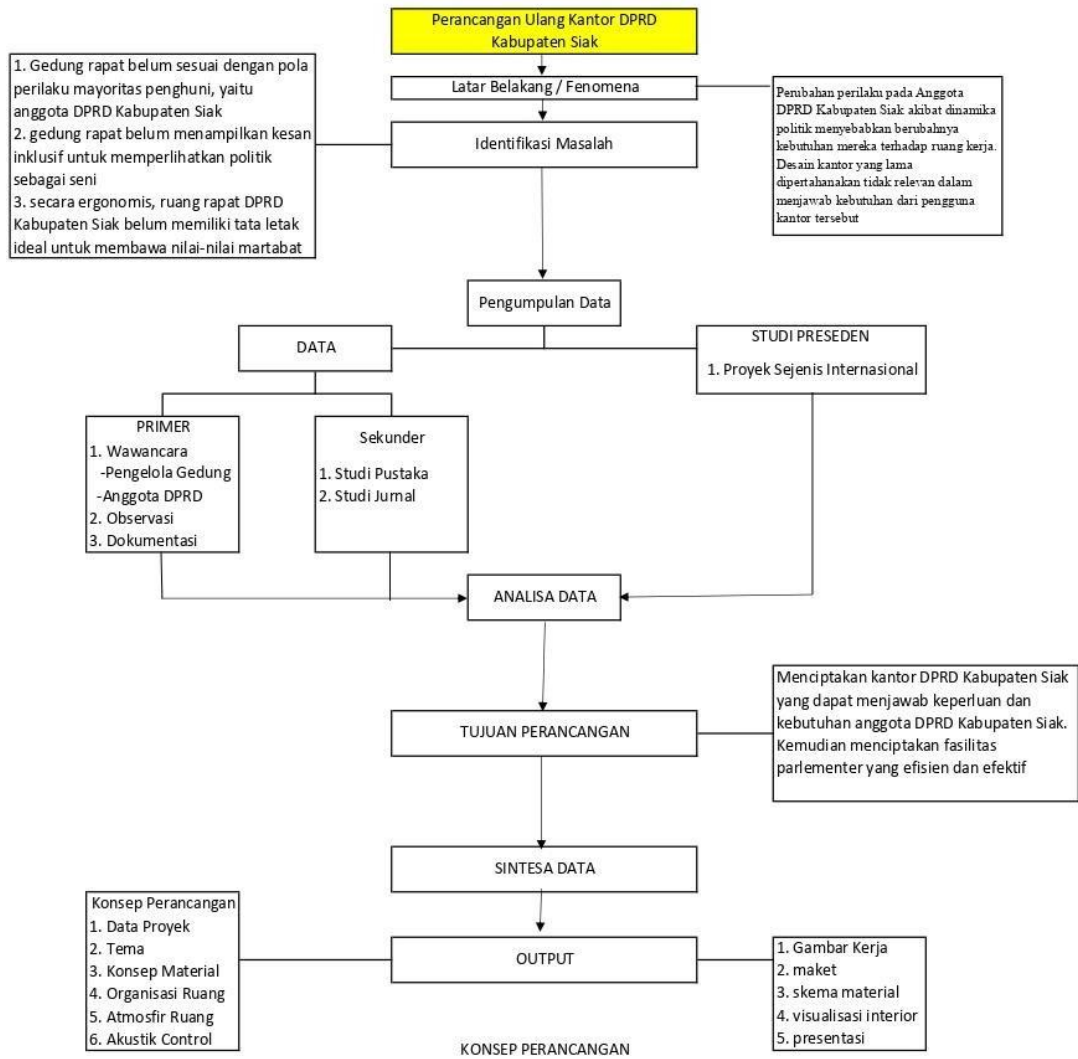
1.7.4 Dokumentasi

Proses dokumentasi dilakukan selama observasi lapangan dengan cara mengambil gambar dari berbagai sudut ruangan untuk memperoleh informasi tentang keunggulan dan kelemahan dari objek perancangan tersebut. Dengan teknik ini, dapat ditemukan penggambaran kasar mengenai rancangan ulang kantor DPRD Kabupaten Siak.

1.7.5 Studi Literatur

Ada pun beberapa studi pendukung untuk menopang perancangan ini ditujukan untuk memuat tentang standar-standar perancangan dan pendekatan perilaku. Terdapat beberapa buku, jurnal, dan beberapa sumber bacaan lainnya. Di antaranya, seperti *The Ten Books of Architecture* (Virtuvius, 1914), serta artikel jurnal berjudul *Behavior Approach for Designing in Architecture* (Indriyati 2022).

1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Sistematika

Sistematika pembahasan pada perancangan ulang kantor DPRD Kabupaten Siak sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang dari pemilihan proyek perancangan ulang Kantor DPRD Kabupaten Siak, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi uraian mengenai definisi proyek, klasifikasi proyek, kajian literatur mengenai gedung parlemen. Selain itu, pada bab ini diuraikan standarisasi gedung dan ruang parlemen.

BAB III: ANALISIS STUDI BANDING, DESKRIPSI PROYEK, DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi proyek, Analisa site, kegiatan, arus aktivitas, serta Analisa studi banding dengan proyek bangunan sejenis.

BAB IV: KONSEP PERANCANGAN

Bab ini berisi uraian mengenai tema dan konsep perancangan gedung seni pertunjukan. Konsep tersebut meliputi konsep material, warna, tekstur, pencahayaan, penghawaan, keamanan, dan juga aksesibilitas pada ruang.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan juga saran untuk pembaca dan juga peneliti